

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, selanjutnya dalam Bab ini peneliti akan membuat kesimpulan serta memberikan saran terkait dengan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam.

5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan pada Bab IV, dapat diketahui sekiranya peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dapat diklasifikasi ke dalam tiga bagian, adapun klasifikasinya ialah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berperan sebagai *regulator*, *facilitator*, dan *catalyst* (Diva, 2009; Nawangsari et al., 2021).

Terkait perannya sebagai *regulator*, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berperan dalam melakukan pendataan bagi UMKM yang terkena dampak Covid-19 agar mendapatkan Bantuan Permodalan Usaha Mikro yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan pendataan dan pemberian informasi terkait bantuan BPUM yang dilakukan dengan jelas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pelaku UMKM mengakui serta merasa dipermudah dan terbantu dalam proses mendapatkan Bantuan Permodalan Usaha Mikro. Yang mana hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Arif (2012) dalam Firdaus (2020), sebagai *regulator*, pemerintah berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan mengeluarkan regulasi agar pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan tertib. Dengan

pendataan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021, sehingga proses pendataan dapat dilakukan dengan baik.

Kemudian terkait dengan perannya sebagai *facilitator*, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berperan sebagai pemberi fasilitas kepengurusan perizinan atau legalitas, sebagai wadah untuk berinteraksi, pelatihan dan pembinaan membantu permodalan. Dalam pelaksanaannya, pelaku UMKM merasa sangat terbantu dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Meski, hanya UMKM yang telah menjadi binaan saja yang bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tetap memfasilitasi UMKM yang ingin mengurus Nomor Induk Berusaha dan terbuka dalam menerima binaan baru.

Pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai fasilitator ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Firdaus (2020). Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan melalui pendidikan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan, hingga pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Sehingga pembangunan UMKM dapat kondusif dan menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan masyarakat agar pembangunan UMKM dapat optimal.

Selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai *catalyst* memiliki kontribusi dalam melakukan pendataan bagi UMKM Kota Batam yang terkena dampak Covid-19 agar dapat menerima bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan

pelatihan, pembinaan, hingga pemasaran yang dilakukan secara situasional baik itu online maupun offline. Selain itu, saat ini terdapat program Enumerator dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang sedang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Melalui pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya pendataan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan bantuan BPUM dari pemerintah. Selain itu, pelaku UMKM juga merasa sangat terbantu dengan diadakannya pameran oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Melalui pameran yang diselenggarakan, UMKM bisa mempromosikan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh, Nirwana dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai katalisator cenderung berperan kepada bagaimana informasi disampaikan dengan komprehensif mengenai suatu persoalan yang sedang menjadi fokus, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 Bagi UMKM Kota Batam, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam menjalankan perannya sebagai upaya penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam didorong oleh beberapa faktor diantaranya; ketersediaan sarana dan prasarana, berupa gedung PLUT-KUMKM; ketersediaan anggaran; kemitraan, yakni dilakukannya kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Pt. Telkom, Akademi Melayu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi, Bea Cukai, perbankan, *Association of The*

Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), dan Bank Jatim; dan partisipasi dari masyarakat.

Selain faktor pendukung yang mempengaruhi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan perannya sebagai upaya penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam juga memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya; adanya kebijakan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); sumber daya yang terbatas; dan tidak lengkapnya dokumen pelaku UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM Kota Batam pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan juga peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diharapkan dapat lebih mensosialisasikan keberadaan UMKM Binaan, agar semakin banyak UMKM yang bergabung dan dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan.
- 2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diharapkan dapat lebih mensosialisasikan fungsi dan keuntungan dari gedung PLUT-KUMKM kepada masyarakat. Sehingga, gedung PLUT-KUMKM dapat lebih dimaksimalkan kegunaannya.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian atau melakukan pengkajian lanjutan terkait dengan pemanfaatan gedung PLUT-KUMKM yang ada di Kota Batam.